



PENGUMUMAN
Hasil Penilkan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL
(Remote Audit)

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilkan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Erna Djulawati
Lokasi : Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
No. IUPHHK - HA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. SK.15/KPTS-IV/1999 Tanggal 18 Januari 1999
Luas : 184.206 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 20-23, 25-26 Oktober 2021

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku dengan masa berlaku 06 November 2017 sampai dengan 05 November 2023.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 23 November 2021



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT ERNA DJULIAWATI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 1.2. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut. (Lead Auditor/Prasyarat)
Raditya Wicaksono, S.Hut. (Auditor Produksi)
Miftah Farid, S.Hut. (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih, SP. (Auditor Sosial)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifarahman
Taufik Margani
Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT ERNA DJULIAWATI
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 15/Kpts-IV/1999, tanggal 18 Januari 1999
- c. Luas dan Lokasi : ± 184.206 Ha
Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Lyman Wing Kota BNI Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
Jl. Adi Sucipto Km-5, Pontianak - Kalbar
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0561) 739777
- f. Pengurus : Indradi Kusuma, S.H. (Komisaris Utama)
Leopard Lyman (Komisaris)
Ir. Iwan Djuanda (Direktur Utama)
Ir. Soeparto (Direktur)
Ir. Maman Surachman (Direktur)
David Lie (Direktur).
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-006

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Rabu, 20 Oktober 2021 melalui Zoom Meeting	<p>Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangkaraya ● Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah <p>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Erna Djuliawati.</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 20 Oktober 2021 melalui Zoom Meeting	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu, 20 Oktober 2021 s.d. Senin, 25 Oktober 2021 melalui Zoom Meeting	<p>Tim Audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan oleh Tim PIC sesuai persetujuan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan Tim Audit menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	Selasa, 26 Oktober 2021 melalui Zoom Meeting	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Pengambilan Keputusan	16 November 2021, Kantor LPPHPL PT Mutuagung Lestari	<i>PT Erna Djuliawati diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK (92,42%).</i>

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, / Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja, Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, terdiri dari akta pendirian perusahaan, akta perubahan terakhir akta Nomor : 14 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Rosita Rianauli Sianipar SH.MKn, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT, BATB dan SK Pengesahan batas definitif (Penguakuan) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 59/Kpts-II/93 tanggal 11 Pebruari 1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 3173/Kpts/VII-KP/2003 tanggal 4 Juli 2003.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK PT Erna Djuliawati telah mencapai 100% (tata batas telah temu gelang) dengan panjang 514.844 meter, dan telah mendapat Pengesahan batas definitif (Penguakuan) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 59/Kpts-II/93 tanggal 11 Pebruari 1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 3173/Kpts/VII-KP/2003 tanggal 4 Juli 2003.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/Peta SK IUPHHK).	Sedang	Letak areal kerja PT Erna Djuliawati pada umumnya berbatasan dengan pemegang izin lainnya dan hutan lindung. Eksistensi areal kerja sudah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan tahun 1993, namun adanya selisih pergeseran antar peta kerja dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah - Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, menjadi sumber konflik batas dengan areal kerja yang telah ditata

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>batas terlebih dahulu di lapangan dan telah mendapat SK Pengukuhan.</p> <p>Terhadap adanya pergeseran antar peta tersebut PT Erna Djuliawati telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Berdasarkan Surat Kepala BPKH Wilayah XXI Nomor : S.526/BPKH.XXI/PKH/TBT.2/12/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Orientasi hasil penataan batas dan pengkoordinatan titik ikatan pada sebagian areal kerja IUPHHK-HA PT Erna Djuliawati, bahwa BPKH telah melakukan pemeriksaan batas areal kerja PT Erna Djuliawati dari tanggal 14 Oktober s/d 7 November 2019, batas areal kerja dikembalikan sesuai hasil tata batas TBT nomor 639 tahun 1992 dan TBT nomor 650 tahun 1992 yang sudah diorientasi di lapangan.</p> <p>Berdasarkan notulen rapat pembahasan hasil orientasi penataan batas dan pengkoordinatan titik ikatan pada sebagian areal kerja IUPHHK-HA PT Erna Djuliawati, tanggal 7 Januari 2020, bahwa laporan hasil orientasi dan penelusuran batas dan pengkoordinatan titik ikatan pada sebagian areal kerja IUPHHK-HA PT Erna Djuliawati yang disampaikan BPKH Wilayah XXI Palangkaraya akan digunakan sebagai dasar pemuktahiran kawasan hutan pada peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan.</p> <p>Berdasarkan Surat Kepala BPKH Wilayah XXI Nomor : S.495/BPKH XXI/PKH/UM/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Tanggapan atas permohonan instruksi kerja pemasangan pal batas atas hasil rapat pembahasan orientasi hasil penataan batas dan pengkoordinatan titik ikat pada sebagian areal IUPHHK-HA PT Erna Djuliawati di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan permohonan orientasi pemeriksaan batas dan pal-pal pada PGM I - IX PT Erna Djuliawati, diketahui bahwa BPKH Wilayah XXI telah sampaikan Instruksi Kerja dan Peta Kerja pelaksanaan rekonstruksi batas sebagian areal kerja IUPHHK-HA PT Erna Djuliawati, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan orientasi batas pada areal PGM tersebut di rencanakan pelaksanaannya pada bulan Desember 2021.</p>
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat	Baik	Berdasarkan hasil overlay Peta SK IUPHHK PT Erna Djuliawati dengan Peta Kawasan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>		<p>Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012), diketahui bahwa terdapat perubahan fungsi kawasan yang disebabkan adanya selisih pergeseran antar peta kerja dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Terhadap adanya pergeseran antar peta tersebut PT Erna Djuliawati telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Berdasarkan Surat Kepala BPKH Wilayah XXI Nomor : S.526/BPKH.XXI/PAKH/TBT.2/12/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Orientasi hasil penataan batas dan pengkoordinatan titik ikatan pada sebagian areal kerja IUPHHK-HA PT Erna Djuliawati, bahwa BPKH telah melakukan pemeriksaan batas areal kerja PT Erna Djuliawati dari tanggal 14 Oktober s/d 7 November 2019, batas areal kerja dikembalikan sesuai hasil tata batas TBT nomor 639 tahun 1992 dan TBT nomor 650 tahun 1992 yang sudah diorientasi di lapangan. Berdasarkan notulen rapat pembahasan hasil orientasi penataan batas dan pengkoordinatan titik ikatan pada sebagian areal kerja IUPHHK-HA PT Erna Djuliawati, tanggal 7 Januari 2020, bahwa laporan hasil orientasi dan penelusuran batas dan pengkoordinatan titik ikatan pada sebagian areal kerja IUPHHK-HA PT Erna Djuliawati yang disampaikan BPKH Wilayah XXI Palangkaraya akan digunakan sebagai dasar penyusunan RKU 2021-2030 PT Erna Djuliawati. RKU 2021-2030 PT Erna Djuliawati telah disahkan pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.808/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2021-2030 atas nama PT Erna Djuliawati Provinsi Kalimantan Tengah.</p>
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor ehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar</p>	<p>Baik</p>	<p>Terdapat bukti upaya PT Erna Djuliawati untuk mendata penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang ada di dalam areal</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
sektor ehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).		kerja PT Erna Djuliawati seluas 1.071,14 Ha, dan telah melaporkan kepada Dirjen PHPL KemenLHK u/b Direktur Usaha Hutan Produksi dengan surat nomor APJ-P.058/21 tanggal 31 Agustus 2021. Terhadap adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tersebut, terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin melalui kegiatan sosialisasi dan patroli pengamanan hutan.
Verifier 1.1.6 Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK PT Erna Djuliawati seluas 1.071,14 Ha dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan melalui koordinasi dengan BPKH Wilayah XXI Palangkaraya dan mencapai penguasaan >80% yaitu (184.206 Ha – 1.071,14 Ha) / 184.206 Ha = 99,82%.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya dituangkan pada naskah tertulis yang ditandatangani Direktur Utama pada tanggal 25 Juni 2012, dan dituangkan pada dokumen RKU Periode 2011 s/d 2020 dan RKU Periode 2021 s/d 2030. Visi misi PT Erna Djuliawati telah sesuai dengan kerangka PHPL karena telah mencakup kelestarian kelola produksi, ekologi dan sosial. Visi misi perusahaan PT Erna Djuliawati telah disosialisasikan mulai level pemegang izin dan kepada masyarakat setempat. Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi berupa dokumen Berita Acara pelaksanaan kegiatan, materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan.
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi PHL sebagian sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi yang belum sesuai antara lain adalah (1) penataan blok RKT 2020 dan RKT 2021 yang disahkan secara self approval dan disusun sesuai RKUPHHK-HA sebesar > 50%, (2) rata-rata realisasi penebangan tahun 2020 belum sesuai dengan rencana yang telah disusun (terrealisasi luas sebesar 82,56% dari rencana dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terealisasi volume sebesar 73,30% dari rencana), (3) sarana prasarana pengendalian kebakaran secara jenis telah tersedia sesuai ketentuan namun secara jumlah belum seluruhnya tersedia sesuai ketentuan yaitu PermenLHK No. P32/MenLHK/SETJEN/ Kum.1/3/2016, (4) terdapat 4 personel pengamanan hutan belum mengikuti Diklat pengamanan hutan, (5) belum dapat menunjukkan bukti pemantauan terhadap sifat fisik kimia tanah, sehingga dengan belum dilaksanakannya pemantauan tersebut berpotensi adanya dampak besar dan penting yang tidak terpantau.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANIS PHPL) sarjana Kehutanan dan tenaga teknis menengah Kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. PT Erna Djuliawati sudah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019. Berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah X Palangkaraya nomor 19/BPHPX-2/2021, 20/BPHPX-2/2021, 21/BPHPX-2/2021, 22/BPHPX-2/2021, 23/BPHPX-2/2021 dan 142/BPHPX-2/2021, dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi ke 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu Bidang Perencanaan Hutan (GANIS-PHPL Kurpet 3 orang dan GANIS-PHPL Canhut 9 orang), Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan (GANIS-PHPL Nenhut 8 orang dan GANIS-PHPL PKB-R 12 orang), Bidang Pembinaan Hutan (GANIS-PHPL Binhut 14 orang).
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Erna Djuliawati pada periode Tahun 2020 adalah 105,79% dari rencana yang telah disusun sesuai kebutuhan, yaitu realisasi sebanyak 1.296 peserta dari rencana 1.225 peserta.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan PT Erna Djuliawati tersedia lengkap, termasuk Laporan Bulanan Tenaga Kerja, Dokumen

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) UU No.7 tahun 1981, serta Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Erna Djuliawati Dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kahut Indonesia (PUK SP Kahut Indonesia KSPSI) Periode Tahun 2020 s/d 2022 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah No. 114/HI.03/IX/NAKERTRANS/2020 tanggal 07 September 2020.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL (telah memperhatikan aspek-aspek pengelolaan hutan lestari yaitu aspek produksi, ekologi, dan aspek sosial), struktur organisasi yang disahkan oleh Direktur Utama PT Erna Djuliawati tanggal 01 Desember 2014 dan job description yang disahkan oleh Direktur Utama PT Erna Djuliawati tanggal 31 Juli 2015.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki perangkat SIM yaitu perangkat keras/hardware (meliputi komputer, radio, V-Sat dan wireless) dan perangkat lunak/software (meliputi program Absensi, Payroll Borongan, Purchase dan Inventory System, GIS, Produksi Internal, Processing Data, dan PGA serta email). Tersedia tenaga pelaksana pada setiap bagian pengguna SIM tersebut.
Verifier 1.4.3 Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Baik	Pada PT Erna Djuliawati tersedia seluruh tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan. SIM KemenLHK pada PT Erna Djuliawati yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan On-Line (SIPUHH On-Line), Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-PNBP), Sistem Monitoring Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI), Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIGANISHUT), E-Monev kinerja HA melalui Aplikasi berbasis WEB dengan alamat http://monevkinerjapha.menlhk.go.id .
Verifier 1.4.4 Keberadaan SPI/internal auditor efektifitasnya	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki organisasi SPI/ internal auditor, dan berjalan dengan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, karena telah menjangkau bidang perencanaan, bidang produksi, bidang sosial dan bidang lingkungan.
Verifier 1.4.5 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Hasil pengawasan oleh tim SPI tahun 2020 dan 2021 terdapat jenis-jenis temuan yang menjadi dasar tindakan perbaikan berbasis Monev. dituangkan dalam tabel rekomendasi. Dari masing-masing bukti tindakan perbaikan oleh manajemen berbasis monev dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan telah mencakup seluruh rekomendasi. Pada dokumen monev terdapat bukti rincian rencana perbaikan dan tindakan pencegahan terkait bidang perencanaan, binhut, produksi dan sosial.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2020 dan RKT 2021 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Sebelum kegiatan operasional RKT 2020 dan RKT 2021 dilaksanakan, PT Erna Djuliawati melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar yaitu sosialisasi RKT 2020 kepada masyarakat Desa Buntut Sapau dan Desa Tumbang Laku, sosialisasi RKT 2021 kepada masyarakat Desa Tumbang Darap dan Desa Tumbang Kasai. Tindak lanjut setelah kegiatan sosialisasi adalah adanya kesepakatan/persetujuan dari masyarakat terhadap rencana kegiatan operasional RKT, ditandai dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan saksi-saksi perwakilan masyarakat, dilanjutkan dengan acara kegiatan Selamatan/Syukuran Pembukaan RKT.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program CSR/CD (PMDH) PT Erna Djuliawati tahun 2020 dan tahun 2021 ditujukan kepada 15 desa binaan. Dari sisi persetujuan proses pembuatan program PMDH tahun 2020 dan 2021 diperoleh bukti adanya persetujuan dari para pihak (Desa Binaan) dari 15 Desa Binaan (persetujuan 15/15=100%). Dari sisi pelaksanaan terdapat persetujuan terhadap

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		realisasi Program PMDH tahun 2020 dan 2021 dari 15 Desa Binaan (persetujuan 15/15=100%) dengan bukti berupa Berita Acara serah terima. Dengan demikian persetujuan dalam proses penetapan program PMDH dan pelaksanaannya dari masyarakat desa binaan adalah 100%.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT Erna Djuliawati dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak yaitu 25 desa di dalam dan di sekitar areal kerja atau 100%.
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki Dokumen RKUPHHK-HA periode 2011-2020 dan revisinya serta RKUPHHK-HA periode 2021-2030 yang sah dan disusun berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan Areal Kerja RKT 2020 dibandingkan RKUPHHK-HA periode 2011 – 2020 kesesuaiannya sebesar 85,10% dan RKT 2021 dengan RKUPHHK-HA periode 2021 – 2030 sebesar 79,26%.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	Baik	PT Erna Djuliawati telah menerapkan penandaan batas blok dan petak RKT 2020 dan RKT 2021 seluruhnya dan terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki data Potensi tegakan 3 RKT terakhir (2019 s/d 2021) yang dilengkapi peta pendukungnya
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)	Sedang	PT Erna Djuliawati telah memiliki data perhitungan PUP yang telah dianalisis, disampaikan ke Instansi yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK. akan tetapi belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki SOP seluruh tahapan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dengan Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) yang isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan ketentuan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		teknis dan seluruh SOP telah diterapkan di lapangan
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Baik	PT Erna Djuliawati mempunyai pohon-pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 sebanyak 33 – 50,85 batang/ha
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Erna Djuliawati mempunyai pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 dengan nilai anakan tiang berjumlah 297.20 batang/ha (LOA) dan berdasarkan uji petik secara remote audit sebesar 333 btg/ha (Blok RKT 2021)
Verifier 2.3.4. Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Baik	PT Erna Djuliawati melaksanakan tahapan-tahapan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dengan teknik Silvikultur Intensif (SILIN) sesuai dengan RKUPHHK-HA
Verifier 2.3.5 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Sedang	PT Erna Djuliawati telah merealisasikan seluruh tahapan Sistem Silvikultur TPTJ Teknik SILIN akan tetapi masih terdapat implementasi PWH dan pemanenan yang dibawah 80%
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Erna Djuliawati telah membuat dan dapat menunjukkan SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Erna Djuliawati telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan pemanenannya dan dimonitoring dengan rutin setiap bulan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Persentase kerusakan tegakan tinggal akibat pemanenan pada tingkat semai, pancang, tiang dan pohon pada hasil ITT RKT 2021 PT Erna Djuliawati < 15%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor Eksploitasi hasil pemanenan PT Erna Djuliawati pada RKT 2021 sebesar 83,4 %.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka	Sedang	PT Erna Djuliawati menyusun RKT 2020 berdasarkan RKUPHHK periode 2010 – 2020

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).		dan RKT 2021 berdasarkan RKUPHHK periode 2021 – 2030 secara <i>self approval</i> serta kesesuaiannya > 50%.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Erna Djuliawati telah mempunyai peta kerja RKT 2020 dan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai > 50% dengan Peta RKUPHHK-HA
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Erna Djuliawati telah melaksanakan implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai Peta RKTUPHHK-HA
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek, serta minimum produksi pemanfaatan hutan.	Sedang	Realisasi volume tebangan total RKT 2020 sebesar 73,30% dan perkelompok jenis rata-rata 57,31% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan yaitu seluas 3.974,04 ha dari target 4.813,56 ha atau 82,56 %
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT Erna Djuliawati Tahun 2020 dengan liquiditas sebesar 341,23 % (> 100%), solvabilitas sebesar 100 % (100 - 150%) dan rentabilitas sebesar 33,66 % (positif) serta catatan akuntan publik adalah wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana Tahun 2020 sebesar 98,22% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi kelola hutan (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	PT Erna Djuliawati mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan di Tahun 2020 kurang proporsional dengan nilai antara 0 – 45%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Erna Djuliawati merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan secara lancar, namun masih terdapat kegiatan yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		belum sesuai dengan tata waktu seperti penanaman dan pemanenan
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Erna Djuliawati telah mengembalikan modal yang ditanamkan di hutan tahun 2020 untuk kegiatan penanaman dan perawatan tanaman sebesar 99,96% tetapi belum seluruh kegiatan terealisasi
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	PT Erna Djuliawati telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) > 80%
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT Erna Djuliawati telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 12.102,65 Ha yang tertuang dalam RKUPHHK HA PT Erna Djuliawati periode tahun 2021-2030, Berdasarkan verifikasi lapangan kondisi biofisik kawasan lindung yang ada di PT Erna Djuliawati sesuai dengan peruntukannya. Namun, Surat Keputusan Direksi PT Erna Djuliawati dalam hal penetapan kawasan lindung belum diperbaharui sebagaimana kondisi perubahan informasi kawasan lindung dalam RKUPHHK HA PT Erna Djuliawati periode tahun 2021-2030. Dengan demikian, informasi luasan kawasan lindung yang tercantum dalam dokumen rencana dan penetapan kawasan lindung oleh Direksi tidak seluruhnya sesuai
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Erna Djuliawati telah melakukan penataan batas kawasan lindung sampai dengan Penilikan 4 tahun 2021, penataan batas sebesar 100,00 % dari yang direncanakan, tanda batas jelas dan dapat dikenali di lapangan
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kawasan Lindung yang masih berhutan hasil overlay dengan Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path 120 Row 61 Liputan tgl 08 Januari 2020, kondisi yang berhutan meliputi 91,48% dari seluruh luasan Kawasan Dilindungi pada areal kerja. Areal yang tidak berhutan merupakan badan sungai dan embung air yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Secara aktual dari hasil dokumentasi lapangan yang diserahkan, menunjukkan sebagian besar tutupan kawasan lindung sangat baik
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan	Baik	Kegiatan sosialisasi untuk pengakuan kawasan lindung di areal PT Erna Djuliawati

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dilindungi		telah mendapatkan pengakuan dari sebagian para pihak antara lain Pemerintah melalui pengesahan dokumen rencana kerja (RKUPHHK-HA), dari masyarakat Desa Binaan, Desa Sekitar dan Desa yang terdampak operasional PT Erna Djulawati. Namun demikian, PT Erna Djulawati belum merevisi Surat Keputusan Direksi dalam penetapan Kawasan Lindung sebagai bentuk pengakuan dari Internal perusahaan, serta belum adanya sosialisasi perubahan informasi kawasan lindung kepada masyarakat
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	PT Erna Djulawati telah memiliki laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/ landscaping/ sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU, dengan cakupan kegiatan berupa, pengamanan kawasan lindung, pemasangan papan nama, pemasangan tanda batas, sosialisasi kawasan lindung, dan pengamatan flora dan fauna di kawasan lindung, serta laporan telah sesuai ketentuan dan mencakup seluruh kawasan lindung
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Erna Djulawati memiliki Prosedur terkait Perlindungan Hutan, prosedur mencakup jenis-jenis gangguan seperti penanggulangan kebakaran, perladangan, monitoring pemanfaatan HHBK dan aktifitas keluar masuk masyarakat, Perburuan, penebangan tanpa izin dan hama penyakit tanaman
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Erna Djulawati telah memiliki sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang memadai meliputi kendaraan patroli, sarana komunikasi, pos pengamanan dan portal, plang himbuan dan larangan terhadap gangguan hutan serta sarana pendukung lainnya. Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di PT Erna Djulawati telah tersedia sebanyak 45 Jenis atau 100 %, sedangkan secara jumlah terpenuhi sebanyak 1053 dari 1083 pcs atau 97,22%. Jenis sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah tersedia jenisnya, namun masih kurang secara jumlah yaitu mobil pemadam kebakaran, pompa induk, pompa jingga, nozzle, tanki air lipat dan selang. Dengan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		demikian, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan secara jenis dan jumlah telah sesuai dengan ketentuan sedangkan sarana prasarana pengendalian kebakaran secara jenis telah tersedia sesuai ketentuan, namun secara jumlah belum seluruhnya tersedia sesuai ketentuan yaitu PermenLHK No. P32/MenLHK/SETJEN/Kum.1/3/2016
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Erna Djuliawati telah memiliki SDM Perlindungan dan pengamanan hutan serta SDM Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. SDM Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri dari regu inti, regu pendukung dan regu perbantuan. Secara keseluruhan jumlah personil dan kualifikasi regu inti telah sesuai ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan. Namun, SDM Perlindungan dan pengamanan hutan masih terdapat 4 personel yang belum mendapatkan Diklat pengamanan hutan. Upaya pemenuhan telah dilakukan berupa pengajuan rencana pelatihan gada pratama satuan pengamanan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	Pada areal PT Erna Djuliawati masih terdapat gangguan berupa perladangan dan kebakaran hutan. Namun demikian telah dilakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan seperti patroli rutin, verifikasi hotspot dan pengendalian kebakaran, pelaporan kepada instansi terkait, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, penyediaan SDM perlindungan hutan (SATPAM dan BRIGDALKARHUTLA) serta penyediaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki 18 prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Prosedur-prosedur tersebut telah mencakup seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia sesuai dengan dokumen perencanaan lingkungan, yaitu dokumen RKL - RPL tahun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		1997, dengan kondisi baik dan fungsinya sesuai
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah SDM dan kualifikasi personil yang tersedia telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen perencanaan berupa RKL AMDAL (1997) dan dokumen RKUPHHK-HA (2021-2030) serta prosedur pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan keseluruhan sesuai rencana dan ketentuan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen perencanaan berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan - AMDAL (1997) dan dokumen RKUPHHK-HA (2021-2030) serta prosedur pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang telah dilaksanakan di lapangan antara lain pemantauan erosi, pemantauan debit sungai, pengukuran sedimen, pengukuran kualitas air sungai, pemantauan kualitas tanah dan pencatatan limbah B3. Dengan demikian PT Erna Djuliawati telah merealisasikan seluruh kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang direncanakan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan verifikasi hasil pemantauan lingkungan dalam dokumen Laporan RKL RPL semester II 2020 dan semester I 2021, secara umum hasil pemantauan lingkungan tidak terdapat adanya dampak besar dan penting. Namun, berdasarkan hasil wawancara masih ditemukan adanya erosi di beberapa lokasi yang disebabkan pembangunan jalan angkutan, hal ini berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting akibat pengelolaan hutan, PT Erna Djuliawati telah melakukan upaya untuk meminimalisir dampak akibat erosi melalui kegiatan penanaman kanan kiri jalan, areal bekas TPn/TPK dan pembuatan terasering pada tebing jalan angkutan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.</p>	Baik	<p>PT Erna Djuliawati telah memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin dan telah sesuai dengan peraturan terbaru tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi yaitu PerMenLHK no. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi</p>
<p>Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.</p>	Baik	<p>PT. Erna Djuliawati telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna dan telah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin</p>
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>		
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	Baik	<p>PT Erna Djuliawati memiliki prosedur pengelolaan flora, Prosedur mencakup spesies dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik yang ada di areal kerja</p>
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	Sedang	<p>PT Erna Djuliawati telah merealisasikan pengelolaan flora untuk seluruh jenis meliputi identifikasi, inventarisasi dan pemantauan. Tahapan kegiatan berupa pengelolaan dalam bentuk pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan untuk jenis flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan bagian SATPAM dan masyarakat, menunjukkan masih terdapat gangguan hutan berupa kebakaran, perambahan dan pembukaan ladang berpindah dengan cara dibakar, hal ini menimbulkan potensi gangguan terhadap keberadaan dan kondisi species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki prosedur terkait pengelolaan fauna. Prosedur mencakup spesies dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Erna Djuliawati telah merealisasikan pengelolaan fauna untuk seluruh jenis meliputi identifikasi, inventarisasi dan pemantauan. Tahapan kegiatan berupa pengelolaan dalam bentuk pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan untuk jenis fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan bagian SATPAM dan masyarakat, menunjukkan masih terdapat gangguan hutan berupa kebakaran, perambahan dan pembukaan ladang berpindah dengan cara dibakar, hal ini menimbulkan potensi gangguan terhadap keberadaan dan kondisi species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. Upaya yang telah dilakukan oleh PT Erna Djuliawati untuk meminimalisir gangguan melalui sosialisasi kepada pemilik ladang berpindah, patroli rutin dan pencatatan aktivitas masyarakat yang keluar masuk di Pos masuk di Km 80
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, yang tertuang pada dokumen: AMDAL, HCVF, RKU, RKT, RKAP, RO, Penilaian dampak sosial, Monografi Desa, PGM, dan dokumen pencatatan HHBK. Pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH yang teridentifikasi pada dokumen tersebut adalah Pemukiman

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan Garapan Masyarakat (PGM), perladangan masyarakat, Kawasan Situs budaya dan Hutan Adat, pemanfaatan HHBK
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & konflik batas kawasan berupa SOP yang telah di revisi seperti SOP Pembuatan Tata Batas Pemukiman dan Garapan Masyarakat PT Erna Djuliawati BCBB Nomor EDL/SOP/4.1, SOP Penanganan Konflik PT Erna Djuliawati BCBB Nomor EDL/SOP/4. Mekanisme tersebut telah diimplementasikan dan disepakati para pihak
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa SOP. Terdapat duapuluh satu SOP terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yaitu terkait hak pemanfaatan lahan, hak pemanfaatan HHBK, hak mendapatkan informasi terkait operasional PT. Erna Djuliawati. Mekanisme berupa SOP tersebut lengkap, legal dan jelas, serta terakhir direvisi Tahun 2021
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan dengan batas kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas Pemukiman dan Garapan Masyarakat, dan Batas Konsesi yang telah temu gelang
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Baik	Terdapat persetujuan para pihak terhadap luas dan batas PT. Erna Djuliawati berupa SK Pengukuhan temu gelang, SK Pengukuhan Batas PGM, Batas partisipatif PGM yang disetujui masyarakat. Masih ada konflik berupa perladangan berpindah/rotasi yang dapat dikelola dengan baik. Luas perladangan berpindah fluktuatif dan PT. Erna Djuliawati melakukan upaya sosialisasi terkait pelestarian hutan dan pola-pola pertanian menetap, untuk menekan pola perladangan berpindah
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan perundangan, berupa dokumen kebijakan umum (Landasan Pelaksanaan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
berlaku.		PHPL), Dokumen rencana sepuluh tahunan (RKUPPHK-HA), Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKTUPPHK tahun 2021 dan 2020), dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan, Rencana Operasional PMDH, Laporan Bulanan, Laporan Dampak Sosial dan lainnya
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap dan legal dalam bentuk SOP yang direvisi pada Tahun 2021, seperti SOP Penerimaan HHBK dari Masyarakat (EDL/SOP/4.14), SOP Penyuluhan Perladangan Berpindah (EDL/SOP/4.10), SOP Kegiatan Kredit Usaha Tani Ayam Potong (EDL/SOP/4.19), SOP Kegiatan Kredit Usaha Tani Sayur (EDL/SOP/4.25) dan lainnya
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	PT Erna Djuliawati telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, seperti: sosialisasi Visi Misi, sosialisasi RKT, sosialisasi PGM, sosialisasi perladangan, sosialisasi Kawasan Lindung, dan sosialisasi PMDH (bersamaan dengan sosialisasi RKT). Bukti kegiatannya berupa BAP, Daftar Hadir, Photo, surat tugas/jalan, dan biaya pelaksanaan.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Erna Djuliawati telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial berupa kegiatan sosialisasi, kegiatan penerimaan tenaga kerja lokal, akses HHNK dan program PMDH kepada seluruh desa-desa binaan. Program PMDH yang sudah terealisasi ditahun 2020 mencapai lebih dari 117 % dari rencana dan tahun 2021 (Agustus) sudah mencapai 74%. Bukti-bukti realisasi tersedia lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Terdapat laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Erna Djuliawati terhadap masyarakat secara lengkap seperti, Laporan Sosialisasi, Laporan bulanan PMDH, Laporan/data penerimaan tenaga kerja lokal, Laporan Monitoring HHNK, Berita acara ganti rugi tanam tumbuh, berita acara bantuan dan lainnya
Indikator 4.3.		
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Tersedia data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH		tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT. Erna Djuliawati. Data tersebut berupa data karyawan lokal, data inventarisasi HHBK, data masyarakat yang berladang, serta data monografi desa-desa binaan yang berjumlah 15 Desa.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa SOP yang direvisi pada Tahun 2021, seperti SOP penyuluhan pemanfaatan pemukiman dan garapan masyarakat (EDL/SOP/4.8), SOP Bantuan masyarakat (EDL/SOP/4.17), SOP Kegiatan kredit Usaha Tani Sayur (EDL/SOP/4.25) dan lainnya
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki lengkap dokumen rencana mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap dan jelas. Rencana tersebut dimuat di Revisi RKUPHHK periode 2011-2020, RKTUPHHK tahun 2020 dan 2021, dokumen rencana operasional tahun 2021 dan tahun 2020, dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2021 dan tahun 2020 dan lainnya.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Terdapat bukti implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh PT Erna Djuliawati, berupa peran serta sebagai pekerja lokal, belanja kebutuhan camp dari masyarakat sekitar, dan realisasi kegiatan PMDH. Total Implementasi mencapai 68,32 % atau lebih dari 50 %
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen/laporan lengkap mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak. Dokumen-dokumen tersebut terdokumentasi dengan baik. Seperti dokumen laporan bulanan PMDH tahun 2020 dan Agustus 2021, Laporan penerimaan KUT Ayam, Sayur dan Ikan Tahun 2020 dan Agustus 2020, Monitoring HHNK, pemasaran hasil bumi, pembayaran PSDH, PPH 21, BPJS dan lainnya
Indikator 4.4.		
Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan implementatif berupa SOP yang direvisi Tahun 2021 seperti SOP Pencegahan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Permasalahan PT Erna Djuliawati (EDL/SOP/4.6), SOP Penanganan Konflik PT Erna Djuliawati (EDL/SOP/4.7). Selain itu SOP telah mengacu pada Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	Terdapat konflik dan potensi konflik, dimana berdasarkan pemetaan konflik yang mengacu Perdirjen P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 bahwa Tahun 2020 dan 2021 berstatus Rendah (Terkendali). Pemetaan dan Resolusi Konflik tersebut sudah lengkap dan sudah disampaikan kepada Instansi terkait
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki organisasi penyelesaian konflik yaitu Susunan Tim Penanganan Kasus Sosial dengan melibatkan para pihak dan disetujui oleh Camat Seruyan Hulu. Selain itu memiliki pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik, dengan terselesaikannya konflik yang membutuhkan pendanaan sebagai kompensasi penyelesaian kasus
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Erna Djuliawati telah mendokumentasikan dengan baik dan lengkap untuk seluruh kasus penyelesaian konflik tahun 2020 dan 2021, seperti dokumen pengaduan, laporan security, dokumen laporan pertemuan, hingga kesepakatan Bersama dilampirkan dengan foto-foto dan peta
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan Industrial pada PT. Erna Djuliawati didasarkan pada dokumen Perjanjian kerja Bersama yang sah dan masih berlaku (2020-2022). Seluruh hubungan industrial yang tertera pada dokumen PKB telah direalisasikan pada seluruh karyawan/pekerja seperti tunjangan kesehatan, tunjangan duka dan lainnya. Tersedia Serikat Pekerja yang berfungsi dengan baik
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT. Erna Djuliawati memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana pelatihan/training eksternal dan training internal. Pada tahun 2020 dan tahun 2021, seluruh rencana pengembangan kompetensi tersebut telah direalisasikan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan petunjuk teknis

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		penilaian pekerja (24.11/D2/Sos/II/III) Form General Affair, Penilaian. Butir-butir dalam dokumen tersebut telah diimplementasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sah dan masih berlaku. Seluruh butir-butir pada dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	Pada kegiatan Penilikan ke-4 tidak terdapat perubahan terkait izin yang sah, izin pengelolaan dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 15/KPTS-IV/1999 tanggal 18 Januari 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Dengan Sistem Tebang Pilih Dan Tanam Jalur Kepada PT Erna Djuliawati Seluas ± 184.206 ha Di Provinsi Dati I Provinsi Kalimantan Tengah dilengkapi dengan lampiran peta Areal Kerja HPH-HTI PT Erna Djuliawati (Periode II) skala 1:100.000. Areal kerja PT Erna Djuliawati berdasarkan Peta Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 skala 1 : 250.000, areal PT Erna Djuliawati termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 179.177 Ha, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 5.029 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dengan luasan areal dan tarif sesuai yang telah ditentukan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal PT Erna Djuliawati terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu terdapat menara

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>komunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Nomor: LGL-KAL-CKL-0049-T-B dan Nomor: APJ-6.008/16 tanggal 14 April 2016 dengan luas 400 m2 ditambah akses jalan sebesar 15 m2. Pendirian menara telekomunikasi telah dilengkapi dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati Seruyan No. 979.3/161/KPPT/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014 serta lokasi areal yaitu a.l pemukiman penduduk, situs budaya, cagar alam, dan hutan adat serta kantor instansi. Sampai dengan kegiatan penilikan ke-4 PT Erna Djuliawati terus berupaya melakukan pendataan penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK yang telah dilaporkan pada instansi terkait</p>
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang		
<p>Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2011-2020, Dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2011-2020 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 4000/MenLHK-PHPL/UHP/HPL1/6/2018 tanggal 21 Juni 2018, dan dokumen RKUPHHK-HA periode 2021-2030 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.808/MenLHK-PHPL/UHP.1/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 dilengkapi dengan peta lampiran skala 1:100.000 serta telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan 2021 yang telah disahkan oleh Direktur Utama secara <i>self approval</i> dilengkapi dengan peta kerja dengan skala 1:100.000 yang telah dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT An. Ir. Rian Junjuran dengan No. Reg. 00775-10/CANHUT/XVIII/2019.</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Erna Djuliawati telah memiliki peta terkait dengan areal/kawasan yang tidak boleh di tebang. Hasil verifikasi diketahui areal/ Kawasan yang tidak boleh di tebang masuk dalam peta HCVF skala 1:100.000 dan telah di tetapkan dalam SK Direktur Utama untuk masing-masing kawasan tersebut. Hasil rekaman foto dan video diketahui, untuk penandaan di lapangan dengan menggunakan cat warna merah, pal kayu ,rintis batas 2 meter dan pemasangan papan nama, untuk</p>

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		lokasi areal tidak boleh ditebang yang terdapat dalam blok RKT 2020 dan RKT 2021 (a.I Sempadan Sungai dan Buffer Zone Hutan Lindung) dengan peta RKT tahun 2020 dan 2021. Implementasi penandaan di lapangan telah sesuai dengan prosedur terkait Penataan Areal Kerja dan Prosedur Pengelolaan Kawasan lindung,
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan tahun 2021 telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Erna Djuliawati serta hasil observasi batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan 2021 posisi blok tebang di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebang RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebang telah dipasang dengan jelas dan dapat ditemukan di lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah memiliki Dokumen revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2021 yang disusun berdasarkan IHMB yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK No. 4000/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan Dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021 – 2030 yang disusun berdasarkan IHMB telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. No. 808/Men LHK-PHP:/UHP/HPL.1/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 serta dilampiri peta skala 1 : 100.000
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	<i>Not Applicable/</i> NA	PT Erna Djuliawati tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Erna Djuliawati dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Erna adjuliawati selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 telah membuat LHP sebanyak 314set dengan jumlah total produksi 194.686,87M3 yang disahkan oleh GANIS PHPL PKB-R yang sah dan berwenang sesuai ketentuan . Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPn. TPK hutan , TPK Antara tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tetapi terdapat perbedaan ukuran volume hasil uji petik tersebut masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak terbang RKT 2020 dan 2021
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Kelakik dan ke industri dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas GANIS PHPL PKB-R yang sah dan berwenang yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan/ penambahan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2020 dan Tahun 2021 PT Erna Djuliawati telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label merah dan nomor internal kode produksi yang dipahat dan label ID Barcode pada bontos kayu
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan label warna merah kode produksi internal, nomor pahatan produksi internal, dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Erna Djuliawati dapat menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas GANIS PHPL-PKB-R yang sah dan berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Seluruh dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, telah terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa kewajiban PT Erna Djuliawati untuk PSDH dan DR telah diterbitkan SPP dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, menunjukkan bahwa PSDH dan DR PT Erna Djuliawati seluruhnya telah dibayar lunas tidak terdapat tunggakan (2%) sesuai dengan tagihan penerbitan SPP berdasarkan pengesahan dokumen LHP. Jumlah PSDH dan DR yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Erna Djuliawati melakukan pembayaran seluruh PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Erna Djuliawati tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Erna Djuliawati tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode di bontos KB dan dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen AMDAL terdiri dari, Laporan Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Kepala Kepala Komisi Pusat AMDAL DEPHUT berdasarkan Keputusan Komisi AMDAL DEPHUT No. 59/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 03 April 1997. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang meru pakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari ANDAL yang telah disetujui Kepala Komisi Pusat AMDAL DEPHUT berdasarkan Keputusan Komisi AMDAL DEPHUT No. 59/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 03 April 1997. Dokumen RKL RPL mengacu kepada dokumen ANDAL yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial ekonomi budaya..
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikanbukti-bukti mplementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2020 dan semester I tahun 2021 yang telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Provinsi
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah mempunyai SOP K3 dan penanganan pandemi Covid – 19 yang telah disosialisasikan pada karyawan untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Keputusan Nomor: KEP.03/DISNAKERTRANS/II/2018 tanggal 04 Januari 2018 dan telah terdapat serta Satgas terkait pandemi Covid - 19. Implementasi SM K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah memiliki peralatan K3 dan sarana/peralatan penanganan Covid 19 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) K3 bagi seluruh karyawan karyawan yang sesuai dengan analisa kebutuhan pekerjaan masing-masing bagian di lapangan, selain itu terdapat juga tabung APAR dan kotak P3K yang dipasang di beberapa tempat seperti kantor, mess karyawan, mess tamu, work shop dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah mempunyai dokumen laporan catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Tabulasi Laporan Kecelakaan Kerja dan telah disampaikan pada instansi terkait . Data yang dimuat dalam tabel laporan kecelakaan kerja, serta terdapat hasil analisa dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Erna Djuliawati telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam PUK KAHUT Indonesia K.SPSI PT Erna Djuliawati Logging Unit II sesuai Surat Keputusan dari Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Nomor: 560/1064/DISNAKERTRANS/VII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pencatatan Serikat Pekerja PT Erna Djuliawati Unit II dengan jumlah anggota 593 karyawan serta telah terdapat realisasi program kegiatan s/d tahun 2021
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020 – 2022 telah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.114/HI.03/IX/NAKERTRANS/ 2020 tentang Pendaftaran PKB PT. Erna Djuliawati Logging Unit II dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kahut Indonesia (PUK SP Kahut Indonesia KSPSI) Perjanjian Kerja Bersama berlaku sejak tanggal 2 November 2020 s/d 1 November 2022 dan telah disosialisasikan pada seluruh karyawan
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi dan wawancara menyatakan bahwa PT Erna Djuliawati tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur 18 tahun . Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Erna Djuliawati pada periode Bulan September 2021 memiliki jumlah karyawan seluruhnya 974 orang tidak terdapat usia yang dibawah 18 tahun

Depok, 16 November 2021

No. : 433.3/SKEP-MUTU/XI/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL PT Erna Djuliawati

Kepada Yth.
Direktur PT Erna Djuliawati
Wisma 46 Lantai 37, Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav-1, Jakarta 10220, Indonesia

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL pada PT PT Erna Djuliawati. sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-006
Masa Berlaku Sertifikat : 06 November 2017 s/d 05 November 2023
Ruang Lingkup :
a. No. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK.15/KPTS-IV/1999 Tanggal 18 Januari 1999
b. Luas : 184.206 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilaian : 20-23, 25-26 Oktober 2021
Tim Audit : Asep Kurniawan, S. Hut : (Lead Auditor & Bid. Prasyarat)
Raditya Wicaksono, S. Hut : (Auditor Bid. Produksi)
Miftah Farid. S. Hut : (Auditor Bid. Ekologi)
Ahmad Kosasih, S. P : (Auditor Bid. Sosial)
Ir. Joko Doso Suwarno : (Auditor Bid. VLK Hutan)
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2)
Hasil Penilaian :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 92,42% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 15 Verifier (terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilaian Ke-5 : September 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021